



## Isu-Isu Aktual Demokrasi Kita

Public Webinar / Diskusi Publik On Line

TEMA: "Isu-Isu Aktual Demokrasi Kita". Hari Jum'at/24 Juli 2020/ Waktu: 14.00 WIB s/d Selesai. Media : Cloudx

Narasumber : Dadang Darmawan, M.Si, Pelaksana CRESEDEPS FISIP UMA

# Pengantar

- Sejak umat manusia memasuki *era-postmodernism* 1970-an hingga sekarang dengan beragam tanda seperti kemunculan *post-truth society*, *medsos*, *hoax*, *simulacra*, dan seterusnya, dalam konteks demokrasi sesungguhnya kita telah memasuki era Demokrasi yang penuh dengan turbulensi.
- George Orwell mengatakan "***In time of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act***" (di zaman penipuan universal ini, mengatakan kebenaran adalah suatu tindakan revolusioner)

- Demokrasi yang digadang-gadang pembawanya sebagai suatu sistem yang tepat dalam melahirkan pemimpin/kepemimpinan yang mensejahterakan rakyat, semakin lama semakin jauh dari harapan, penuh dengan kecacatan dan berdampak buruk bagi seluruh mahluk alam.
- Tidak terkecuali di Indonesia, demokrasi politik yang dihelat melalui penyelenggaraan Pemilu/Pilkada rutin sejauh ini justru hanya menghasilkan dampak buruk dalam seluruh lapangan kehidupan (ipoleksosbudhukum lingkungan, dls).

- Terlebih pada era reformasi (1999-2020) yang paradoks, yang awalnya diprediksi akan “menyelamatkan” nasib bangsa Indonesia dari Bahaya rezim Orde Baru (1966-1998), namun ternyata justru semakin membuat kehidupan masyarakat terpuruk (kerusakan SDA, masalah sosial, korupsi, hutang, krisis ideologi/krisis kepercayaan/kepemimpinan juga krisis demokrasi).
- Sejak Pemilu 1999 dan dimulainya era Pilkada Langsung (pertama kali diselenggarakan bulan Juni 2005, di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur) berbagai isu-isu politik dalam Pemilu/Pilkada muncul silih berganti dan bertumpuk, yang justru semakin memperkeruh suasana dan berdampak buruk.

- Karenanya Isu-isu politik yang bermotif kepentingan kelompok/pribadi hanya untuk kekuasaan semata, jelas akan menghilangkan dimensi pendidikan, literasi ataupun kualitas demokrasi.
- Padahal secara fungsional Isu sangat erat berhubungan dengan Sosialisasi, Partisipasi dan Komunikasi Politik yang disosialisasikan baik melalui jalan DIKPOL maupun indoktrinasi.

# Isu Aktual Demokrasi Kita (Pemilu/Pilkada 1999-2020)

- Secara umum terjadi perubahan isu yang dominan dalam setiap Pemilu/Pemilukada kita sejak 1999 sampai 2019, dimana perubahan tersebut mengikuti situasi lingkungan yang berkembang pada saat itu.
- 1999 : Isu dominannya adalah “reformasi/ perubahan”, yaitu perubahan dari sistem politik Orba yang tertutup/ antidemokrasi/ militeristik/ sentralis menuju sistem politik yg reformis, demokratis, transparan dan sipil.
  - Perubahan Golkar menjadi Parpol
  - Menangnya PDIP mengalahkan Golkar, dan naiknya kaum reformis ke tampuk Kekuasaan (Eksekutif/legislatif)
  - Terjadinya Perubahan Kebijakan Pro-Reformasi 1999-2004
  - Otonomi Daerah (Manajemen & Efisiensi SDM/A Lokal & Demokrasi Lokal

- 2004-2009 : Isu dominannya adalah “kekuasaan”, yaitu terjadinya perebutan kekuasaan kaum reformis, kegagalan kekuasaan sipil (Mega/Gusdur/Amin), menguatnya kembali calon berlatar militer, pencitraan, dan konsultan politik.
  - Pecahnya kekuatan Sipil
  - SBY terpilih sebagai Presiden RI mengalahkan Megawati
  - PDIP menjadi kekuatan Oposisi
  - Kelompok Parpol Islam masuk Kabinet
  - 2009 : Isu dominannya masih seputar “perebutan kekuasaan”,
  - Penggunaan mesin birokrasi oleh Petahana,
  - Menguatnya politik uang, dan
  - Menguatnya politik pencitraan dan formalisme politik
  - Menguatnya Konsultan Politik

- 2014-2019 : Isu dominannya seputar “perubahan, dari citra kepada fakta”, “perebutan kekuasaan antar kelompok dominan”, meningkatnya politik uang, pencitraan, pemanfaatan birokrasi, politik identitas/agama.
  - Terpilih Jokowi yang “ndeso” apa adanya, sebagai Presiden RI 2014-2019
  - Perubahan anti kemapanan/petahana
  - Politik uang menggurita,
  - Perebutan kekuasaan oleh kelompok dominan,
  - Pemanfaatan mesin birokrasi/aparat,
  - Politik identitas/agama,
  - Politik Dinasti
  - Politik Agama Versus Politik Kebangsaan

- Tahun 2020 : sejauh yang dapat kita catat di lapangan, terdapat 5 (lima) isu aktual yang muncul dalam demokrasi kita utamanya dalam pelaksanaan Pemilukada 2020 yang diselenggarakan oleh KPUD di 271 Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yaitu : 1. Isu tentang Politik Dinasti, 2. Isu tentang Politik Petahana, 3. Isu tentang Politik Identitas, 4. Isu Pemilu 2020 Ditengah Pandemi, dan 5. Isu Politik Uang dalam Pilkada.
  - Majunya Gibran dan Bobby Nasution
  - Pemanfaatan Dana/Bansos Covid-19 oleh Petahana
  - Politik identitas (SARA) tetap Menguat
  - Pemilu ditengah pandemi yang menguntungkan partai besar, prediksi anjloknya partisipasi pemilih, dan politik uang

**Politik Identitas Dan Gerakan Reformis Islam Penyebab Banyaknya Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Jawa Barat**

**"KAFIIRR!!!!"  
"BUBAR!!!"**



**"BUBARKAN!!"**



**POLITIK IDENTITAS HARUS DIHILANGKAN  
KARENA HANYA MENIMBULKAN SIKAP  
INTOLERAN DAN MEMICU PER**



#bahasa | kata hari ini

Kamis 9 Juli 2015

**Calon Petahana Langsung Daftarkan Diri di Pilkada**

Kompas.com, Rabu 8 Juli 2015

nomina, kata benda  
 ■ **pe-ta-ha-na** pemegang jabatan publik yang sedang berkuasa (*incumbent*)

KONTEKS  
 KATA  
 MISALNYA  
 DALAM  
 PEMILIHAN  
 KEPALA  
 DAERAH



**petahana**



Petahana terbentuk dari kata dasar **ta-ha-na**



**Tahana** adalah kata lama dalam bahasa Melayu yang berarti kedudukan, martabat, kemuliaan, dsb.

BERITAGAR.COM JULI 2015  
 @beritagarID • facebook.com/beritagar

TEKS & DESAIN: BERITAGAR  
 GAMBAR: FREEPR.COM, PLATFORM.COM, GETTY IMAGES

#beritagar

Departemen Kajian dan Literasi

**Politik Identitas dan Tahun 2019**

#KajianCUK  
 KSM Eka Prasetya UI

0812-8612-6526 (trsyadi) @cmv1724p @ksmepul @ksm.ui.ac.id

KSM EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA @ksmekaprasetyaui@gmail.com @ksm Eka Prasetya UI @ksmepul

**...DINASTI?!  
 APA SALAHNYA...  
 KALAU MEMANG  
 MAMPU...**

**mAMPU...  
 'nyuAP  
 YA' PAK?**

GITSU • DIPA

## Presiden Tidak Harus Berhenti Atau Cuti Ketika Menjadi Petahana



Berbagai Meme Yang Hanya Mengutip Sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, Padahal UU Tersebut Sudah Tidak Berlaku Lagi, Adalah Meme Yang Menyesatkan Dan Berbahaya Bagi Keselamatan Bangsa Dan Negara, Khususnya Dalam Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024.

### ANTARA STRATEGI DAN BOTOH

7 dari 28 petahana kalah Pilkada

#### PENYEBAB KEKALAHAN:

1. Strategi penantang lebih bagus
2. Warga ingin perubahan
3. Prediksi adanya botoh yang bermain



ILUSTRASI: AJIBAL SAPUL/JPK

# LARANGAN MUTASI BAGI PETAHANA

## Pasal 71

(UU Nomor 10 Tahun 2016)

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 188

(UU Nomor 10 Tahun 2016)

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Pasal 190

(UU Nomor 10 Tahun 2016)

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Pasal 73

(UU Nomor 10 Tahun 2016)

- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.





Sejumlah politikus dan pejabat pemerintahan memanfaatkan bansos untuk masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 untuk urusan pencitraan. Tak malu-malu, mereka memasang nama, foto wajah, dan instansi di beragam bansos.



**TAS PRESIDEN RI**  
Bansos dari pemerintah pusat untuk warga sempat tersendat pada akhir April. Paket sembako itu tidak bisa disalurkan lantaran tas berwarna merah putih bertuliskan Bantuan Presiden RI habis.



**SURAT ANIES**  
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyisipkan sepucuk surat dalam tiap paket bantuan sosial (bansos) yang diberikan untuk pada warga DKI Jakarta, April lalu. Isinya menyemangati warga DKI Jakarta supaya tetap kuat melalui masa pandemi.



**PENYANITASI TANGAN SRI MULYANI**  
Stiker foto Bupati Klaten Sri Mulyani terpampang pada bungkus ribuan penyanitasi tangan yang dibagikan untuk warga di Klaten di penghujung April. Di balik stiker itu, ternyata tertulis logo Kemensos.



**BERAS BERLOGO FAIDA**  
Wajah Bupati Jember Faida nongol pada karung beras bansos untuk warga terdampak Covid-19 pada awal Mei. Padahal, beras itu merupakan sumbangan dari Kemensos. Faida diketahui bakal maju lagi di Pilkada 2020

# Simpulan : Apa yang Terjadi?

- Isu-isu yang muncul dalam konteks Demokrasi kita lebih mencerminkan kepentingan kelompok demi mencapai kekuasaan dengan menegasikan pendidikan, kesadaran, dan literasi politik ketengah masyarakat.
- Akibatnya Isu-isu yang dikelola oleh seluruh kelompok yang bertikai lebih bersifat agitasi dan propganda politik untuk “membunuh” lawan politik.
- Isu-isu negatif maupun isu-isu hitam justru lebih dominan dikembangkan dengan berbagai media yang ada membanjiri informasi yang masuk ke masyarakat.

- Suasana ini mirip seperti yang digambarkan oleh seorang marxis perintis Rusia, Plekhanov, yang menunjukkan bagaimana para propagandis dan agitator bekerja “Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang; seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke sejumlah besar orang (massif).
- Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual, berupaya ‘mendorong’ suatu *tindakan* terhadap isu tersebut. Propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih sistematis.

- Doktrin lama dari teori agitasi dan propaganda yg dianut oleh Jozef Goebbels, Menteri Propaganda Nazi pada zaman Hitler di Jerman, mengatakan: “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya.” Tentang kebohongan ini, Goebbels juga mengajarkan bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja.
- Fokus utama pada doktrin lama teori agiprop tersebut adalah “kebohongan yang diulang-ulang”, yang akhirnya akan diterima sebagai “kebenaran”.

- Isu-isu politik dengan demikian ditujukan untuk menasar para pemilih emosional yang miskin kognisi (*Bounded Rationality* yaitu teori tentang perilaku manusia yang memilih karena dihadapkan pada keterbatasan kognitif. Khususnya karena keterbatasan informasi tentang hal yang dipilih. BR bertujuan menghadirkan atau membentuk perilaku *heuristic*/penyelidikan terhadap target sehingga menjadi rujukan (*affect refferal*) secara emosional.
- Karenanya semua kontestan penyebar Isu negatif/kampanye hitam masih percaya bahwa Isu Korupsi, SARA, Netralitas Petahana, Dinasti, Uang bisa secara efektif mempengaruhi pemilih, meskipun akan menimbulkan dampak yang sangat buruk pada masyarakat.

- Dengan demikian demokrasi kita sesungguhnya telah merepresentasikan kematian nalar publik yang cukup parah, berlakunya hukum dagang pandir “*bohong dijual dengan tipu dibeli dengan dusta*” sebagai transaksi, yang menjadi pertanda awal telah matinya demokrasi kita.
- Seandainya ada solusi, maka sejauh ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan dampaknya adalah dengan cara : melakukan pendidikan politik, adanya *endorsement*/dukungan dari kelompok bijak, adanya persaudaraan/ kekerabatan yang saling mengingatkan ke arah kebaikan, yang juga akan menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk diimplementasikan.

*Terima*

*Kasih*